

**EVALUASI ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS  
TERHADAP ANAK STUNTING DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUBANG  
PROVINSI JAWA BARAT**

Moch. Rafi Azhar Budiman  
NPP. 31.0367

*Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor*  
*Program Studi Keuangan Publik*  
Email: 31.0367@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Restu Widyo Sasongko, S.Pd.,M,Si

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** Stunting is a serious health problem in Indonesia, including in Subang District, West Java. The government has allocated a Special Allocation Fund (SAD) for the prevention of stunting in the Subang district health department. The study aims to evaluate the use of Special Allocation Fund (SAD) in stunting control in Subang District. **Purpose:** The purpose of carrying out this research is to analyze and find out the evaluation of the Special Allocation Fund (DAK) Budget for stunted children in the Subang Regency Health Service, West Java Province, to analyze and find out the supporting and inhibiting factors in the evaluation of the Special Allocation Fund (DAK) Budget for children stunting in the Subang Regency Health Service, West Java Province, to analyze and determine efforts to overcome inhibiting factors in evaluating the Special Allocation Fund (DAK) budget for stunted children in the Subang Regency Health Service, West Java Province? The aim of this research is to determine youth participation in the literacy corridor program in Paccinongang Village. **Method:** The research method used is evaluation with a qualitative and descriptive approach. Primary data was collected through interviews, observations, and questionnaires to stakeholders in the Subang district health department, puskesmas, and health cadres. **Result:** The results of the research show that the Budget of the Physical Special Allocation Fund (DAK) for the Budget Year 2023 covers a number of activities aimed at strengthening health services, especially in Public Health Center (Puskesmas) and PONEK-capable hospitals. One of the activities emphasized is the strengthening of services in Pushesmas, which includes the provision of ultrasound services (USG) to monitor pregnancies. Ultrasound is an important diagnostic tool that allows early detection of pregnancy problems as well as periodic monitoring of fetal development, thereby improving the quality of care for pregnant mothers and unborn babies. **Conclusion:** By implementing the suggestions above, it is hoped that an environment that is more conducive to the effectiveness and efficiency of using the DAK budget in preventing stunting can be created. It is also hoped that these steps will help reduce stunting rates significantly and improve the welfare of Indonesian children in the future.

**Keywords:** : Evaluation, Budget, Special Allocation Fund, Stunting, Health Service

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Stunting merupakan masalah kesehatan serius di Indonesia, termasuk di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Pemerintah telah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk penanggulangan stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Subang. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Subang. **Tujuan:** Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui evaluasi Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap anak stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, untuk menganalisis dan mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam evaluasi Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap anak stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, untuk menganalisis dan mengetahui upaya mengatasi faktor-faktor penghambat dalam evaluasi Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap anak stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi pemuda dalam program lorong literasi di Kelurahan Paccinongang. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah evaluasi dengan pendekatan kualitatif dan deskriptif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan kuesioner kepada para pemangku kepentingan di Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, puskesmas, dan kader kesehatan. Data sekunder dikumpulkan dari dokumen-dokumen terkait Dana Alokasi Khusus terhadap anak stunting di Kabupaten Subang. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk Tahun Anggaran 2023 mencakup sejumlah kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat layanan kesehatan, terutama di Puskesmas dan rumah sakit mampu PONEK. Salah satu kegiatan yang ditekankan adalah penguatan layanan di Puskesmas, yang mencakup penyediaan layanan ultrasonografi (USG) untuk memantau kehamilan. Alokasi dana sebesar Rp. 138.000.000 per paket digunakan untuk tujuan ini. USG merupakan alat diagnostik penting yang memungkinkan deteksi dini masalah kehamilan serta pemantauan perkembangan janin secara berkala, sehingga dapat meningkatkan kualitas perawatan ibu hamil dan bayi yang belum lahir. **Kesimpulan:** Dengan mengimplementasikan saran-saran di atas, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih kondusif bagi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran DAK dalam penanggulangan stunting. Langkah-langkah ini juga diharapkan dapat membantu menekan angka stunting secara signifikan dan meningkatkan kesejahteraan anak-anak Indonesia di masa mendatang.

**Kata kunci:** Evaluasi, Anggaran, Dana Alokasi Khusus, stunting, Dinas Kesehatan

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Stunting adalah masalah kesehatan di mana tinggi badan seseorang kurang dari normal atau tidak sesuai dengan umur atau usianya. (Oktavia, 2020). Stunting merupakan kondisi gagal pertumbuhan pada anak balita yang disebabkan oleh kekurangan nutrisi, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai, adalah salah satu masalah gizi utama di Indonesia. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization), kesehatan adalah keadaan fisik, mental, dan sosial yang sejahtera ataupun tidak memiliki penyakit atau kecacatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan sebagai dasar hukum di Indonesia yang membuat negara dapat leluasa mengatur kesehatan warga negaranya, mulai dari tingkat kesehatan, fasilitas dan pelayanan kesehatan dan lain-lain.

Deteksi dini penyakit (menular dan tidak menular) memungkinkan untuk pencegahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, negara dapat leluasa mengatur tingkat kesehatan, fasilitas, pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan program penanggulangan stunting bagi anak-anak yang mengalami kekurangan gizi. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara pemangku kepentingan.

Tingginya prevalensi stunting dalam jangka panjang akan berdampak pada kerugian ekonomi bagi Indonesia. Pengalaman dan bukti Internasional menunjukkan bahwa stunting dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan produktivitas pasar kerja, sehingga mengakibatkan hilangnya 11% PDB (Produk Domestik Bruto) serta mengurangi pendapatan pekerja dewasa hingga 20% (Kemensesneg, 2022). Bank Dunia juga menyebutkan bahwa stunting dan masalah gizi lain diperkirakan menurunkan produk domestik bruto (PDB) sekitar 3% per tahun (Bappenas, 2021). Selain itu, stunting juga dapat berkontribusi pada melebarnya kesenjangan, sehingga mengurangi 10% dari total pendapatan seumur hidup dan juga menyebabkan kemiskinan antar-generasi (Kemenkes, 2019).

Langkah penting dalam menangani masalah stunting adalah menyediakan layanan kesehatan bagi anak stunting. Pelayanan kesehatan ini harus menyeluruh, berkelanjutan, dan melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, layanan kesehatan, keluarga, dan masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Dana Perimbangan terdiri dari dua komponen utama: Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Umum terdiri dari dua bagian, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum. Di sisi lain, Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung kegiatan khusus di tingkat daerah, baik yang bersifat fisik maupun non fisik dan terkait dengan kewenangan daerah.

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021 menyatakan bahwa:

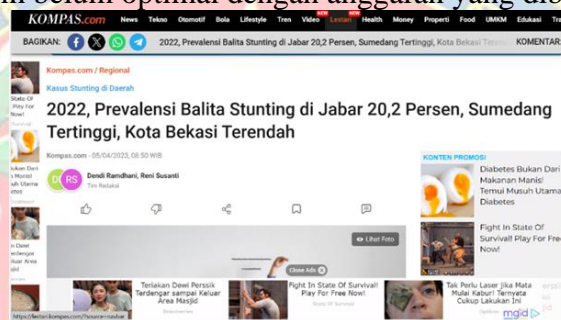
Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Pernyataan tersebut, membuat penulis memahami bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana alokasi dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang tujuannya adalah untuk membantu mendanai urusan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan khusus fisik dalam pelayanan kepada masyarakat. Dua komponen utama Dana Transfer Khusus adalah Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Dana Alokasi Khusus (DAK) bertujuan untuk memberikan bantuan keuangan untuk melaksanakan kegiatan khusus di daerah tertentu yang terkait dengan tanggung jawab dan tugas pemerintah daerah sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus juga bertujuan untuk mempercepat pembangunan di wilayah yang mungkin belum mencapai standar tertentu atau memerlukan dana tambahan untuk infrastruktur dan fasilitas. Salah satu contoh program khusus yang masuk dalam prioritas nasional adalah program dalam bidang kesehatan. Dengan demikian, Dana Alokasi yang diperuntukkan untuk mendukung program-program kesehatan di daerah tersebut disebut sebagai Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.07/2019 Tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi. Serta pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Peraturan ini

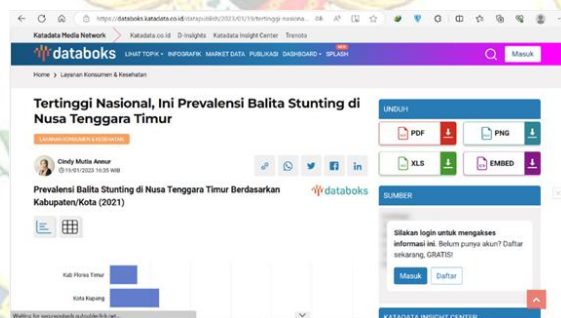
memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang mencakup alokasi anggaran untuk berbagai sektor, termasuk kesehatan dan gizi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2019 Tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Kesehatan yang mencakup pengelolaan badan layanan umum kesehatan, yang termasuk dalam rangkaian upaya peningkatan pelayanan kesehatan yang relevan untuk anak stunting.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2023 mengatur tentang petunjuk teknis dana alokasi khusus fisik tahun anggaran 2023. Dengan adanya dasar hukum mengenai petunjuk operasional tersebut, dinas kesehatan sebagai pelaksana dan pemberi layanan di bidang kesehatan agar dapat terarah dan akuntabel karena sudah dijelaskan aturan dan indikator yang menjadi acuan untuk dipedomani. Berikut adalah beberapa informasi yang mendukung gagasan bahwa stunting adalah salah satu masalah gizi utama di Indonesia. Tingkat stunting di Jawa Barat meningkat sebesar 4,3% dari tahun 2021 hingga 2022. Ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah untuk mengurangi stunting masih belum optimal dengan anggaran yang diberikan.



**Gambar 1.1**  
**Berita Data Balita Stunting di Jawa Barat**

Sumber: <https://bandung.kompas.com/read/2023/04/05/085016478/2022-prevalensi-balita-stunting-di-jabar-202-persen-sumedang-tertinggi-kota?page=all>



**Gambar 1.2**  
**Berita Data Balita Stunting di Nusa Tenggara Timur**

Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/19/tertinggi-nasional-ini-prevalensi-balita-stunting-di-nusa-tenggara-timur>

Pada Gambar 1.1 diketahui bahwa Kabupaten Subang memiliki 1.843 kasus stunting dengan prevalensi atau jumlah dari tahun 2021 sebanyak 18,1-persen. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 dengan prevalensi stunting sebanyak 15,7 persen. Sedangkan, dalam Gambar 1.2 disebutkan bahwa Nusa Tenggara Timur adalah provinsi dengan stunting tertinggi di Indonesia dengan 43,5%, diikuti oleh Papua dengan 40,8%, dan Sulawesi Tengah dengan 40,0%. Kedua provinsi ini terletak di wilayah timur Indonesia, di mana kemiskinan tinggi dan akses pangan terbatas.

Angka stunting di Kabupaten Subang pada Badan Pusat Statistik tahun 2018 adalah 28,6 % data ini terbilang cukup besar dimana pada tahun 2018 masih banyak masyarakat belum mampu untuk memenuhi kebutuhan balita.



**Gambar 1.3**  
**Berita Terkait Pencegahan Stunting di Kabupaten Subang**

Sumber: <https://benpas.subang.go.id/berita/kasus-stunting-di-subang-alami-penurunan-dp2kbp3a-dan-dinkes-subang-jelaskan-berbagai-upaya-pencegahan>

Pada Gambar 3, disebutkan bahwa kasus stunting di Kabupaten Subang telah mengalami penurunan. Hal ini diperkuat dengan Upaya pencegahan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Subang. World Health Organization (WHO) menggambarkan stunting sebagai kondisi gagal pertumbuhan pada anak balita yang disebabkan oleh kekurangan gizi yang berkelanjutan, terutama selama 1.000 hari pertama kehidupan (HPK). Stunting didefinisikan sebagai tinggi badan anak di bawah 2 standar deviasi dari median kurva pertumbuhan WHO. Standar WHO untuk prevalensi stunting adalah kurang dari 20%. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 9 Tahun 2022 menetapkan tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Subang. Ini terutama berlaku untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, yang merupakan pengguna anggaran dan penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan.

**Tabel 1 : Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2021-2023**

Tahun	Bidang DAK Fisik	Nilai DAK (Rp)
2021	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i>	0
2022	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i>	2.709.191
2023	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i>	20.559.380

Sumber : Data Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan

## 1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan Evaluasi Anggaran Dana Alokasi Khusus Terhadap Anak Stunting di Dinas Kesehatan Subang Provinsi Jawa Barat, Tingginya prevalensi stunting dalam jangka panjang akan berdampak pada kerugian ekonomi bagi Indonesia. Pengalaman dan bukti Internasional menunjukkan bahwa stunting dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan produktivitas pasar kerja, sehingga mengakibatkan hilangnya 11% PDB (Produk Domestik Bruto) serta mengurangi pendapatan pekerja dewasa hingga 20%. Tingginya prevalensi *stunting* dalam jangka panjang akan berdampak pada kerugian ekonomi bagi Indonesia, tingkat

*stunting* di Jawa Barat meningkat sebesar 4,3% dari tahun 2021 hingga 2022, adanya keterbatasan data rincian output yang dihasilkan dari pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik) pada tingkat kabupaten/kota dan pengalokasian anggaran masih kurang merata dalam penanganan kasus *stunting* di Kabupaten Subang. *stunting* juga dapat berkontribusi pada melebarnya kesenjangan, sehingga mengurangi 10% dari total pendapatan seumur hidup dan juga menyebabkan kemiskinan antar-generasi. Kabupaten Subang memiliki 1.843 kasus *stunting* dengan prevalensi atau jumlah dari tahun 2021 sebanyak 18,1 persen. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 dengan prevalensi *stunting* sebanyak 15,7 persen. Angka *stunting* di Kabupaten Subang pada Badan Pusat Statistik tahun 2018 adalah 28,6 % data ini terbilang cukup besar dimana pada tahun 2018 masih banyak masyarakat belum mampu untuk memenuhi kebutuhan balita.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Pelaksanaan penelitian ini menggunakan referensi dan juga patokan kepada penelitian yang sudah dilaksanakan sebelumnya yang dinilai memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan oleh penulis. Penelitian yang dilakukan oleh (Yumanda & Vidriza, 2022) berjudul Pengelompokan Provinsi Prioritas di Indonesia Guna Menilai Efisiensi Proporsi Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Sanitasi dan Air Minum Tahun 2020 yang berlokasi di daerah Jawa Tengah. Dari hasil perbandingan deskriptif-statistik, diketahui bahwa alokasi DAK Fisik Sanitasi tahun 2020 menunjukkan kinerja yang baik dalam hal pendanaan pada daerah-daerah anggota klaster prioritas kedua, ketiga, keempat, dan kelima yang ditunjukkan dari lebih besarnya rata-rata porsi alokasi per daerah pada klaster urutan prioritas teratas dan semakin kecilnya porsi alokasi pada klaster-klaster urutan prioritas di bawahnya.

Penelitian yang dilakukan oleh (Lathifah & Ramdani, 2022) berjudul Evaluasi Kinerja Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan. Berdasarkan hasil pengukuran 4 indikator Value for Money menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan DAK Fisik Bidang Pendidikan di Indonesia dapat dikatakan baik. Hal ini dilihat dari hasil pengukuran indikator ekonomi, indikator efisiensi, indikator efektivitas dan indikator cost effective yang memiliki hasil yang baik.

Penelitian yang dilakukan oleh (Irvanjaya Ramdan, 2022) berjudul Implementasi Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan Dalam Mendukung Pemulihan Kesehatan Pasca Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitiannya adalah Pemerintah Kabupaten Subang, lebih khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Subang sebagai salah satu penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan sekaligus penyelenggara kesehatan serta pengguna anggaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 10 menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah menganggarkan DAK Fisik Bidang Kesehatan ke dalam APBD dan/atau APBD Perubahan berdasarkan rencana kegiatan bidang atau sub bidang DAK Fisik yang telah disetujui Kementerian Kesehatan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rochaendi & Salim, 2020) berjudul Implementasi Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Sekolah Dasar. Hasil penelitian adalah implementasi penyaluran Dana Alokasi Khusus bidang Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2012-2016 secara garis besar sudah sesuai dengan petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan penggunaan DAK bidang Pendidikan tetapi tidak sepenuhnya berjalan secara optimal.

Penelitian yang dilakukan oleh (Yuliana, 2019) berjudul Dampak Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Terhadap Sosial Dan Lingkungan Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat merupakan program yang bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang kondisi sanitasi dan solusi dalam penyediaan sarana prasarana sanitasi untuk masyarakat.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu yakni penelitian ini berfokus pada evaluasi anggaran dana alokasi khusus untuk penanganan kasus stunting yang ditangani oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Subang yang tentunya belum pernah dilakukan penelitian serupa terkait penelitian ini, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi sehingga hasil penelitian yang akan diperoleh merupakan hasil nyata yang dilakukan oleh peneliti selama pelaksanaan penelitian yang bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Subang dan didampingi langsung oleh pegawai-pegawainya dalam proses pelaksanaan penelitian.

#### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui evaluasi Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap anak stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam evaluasi Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap anak stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat.

### **II. METODE**

Peneliti dapat menarik kesimpulan dari pendapat para ahli di atas bahwa metode penelitian kualitatif dan metode deskriptif bertujuan untuk meneliti keadaan suatu objek yang saling berkaitan satu kesatuan menyertakan peneliti sebagai instrumen penelitiannya. Dari hal tersebut data yang didapati akan di analisa secara kuantitatif dan ditarik kesimpulan secara induktif. Peneliti mewawancarai anggota penelitian atau partisipan dengan cara memberikan pertanyaan sesuai permasalahan yang diteliti, hingga semua informasi dikumpulkan dalam bentuk kata atau teks. Dari kumpulan informan itu dilakukan analisa dan hasil dari analisa peneliti menjelaskan dengan penelitian sebelumnya sebagai perbandingan. Kemudian hasil penelitian kualitatif dimuat dalam bentuk laporan tertulis. Sumber data yang digunakan yakni data primer (Hasil wawancara) dan data sekunder (file, dokumen atau melalui perantara orang lain). Pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknik analisis datanya yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Pada penelitian ini, peneliti memilih lokasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Subang.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian ini membahas tentang uraian dan analisis data-data yang diperoleh dari pengumpulan baik secara primer maupun sekunder memperdalam hasil analisis. yang dilakukan penulis dilapangan. Data primer penelitian ini merupakan hasil dari wawancara dengan para informan. Data tersebut merupakan data pokok dimana dalam penganalisan ditunjang oleh data-data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen terkait untuk memperkuat dan memperdalam hasil analisis. Hasil penelitian akan menjelaskan mengenai Kemampuan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, faktor yang menjadi pendukung dan penghambat kemampuan keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, serta upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Subang dalam berupaya mengatasi hambatan kemampuan keuangan Kabupaten Subang

#### **3.1. Evaluasi Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Anak Stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat**

Program mengalokasikan sumber daya untuk penguatan kapasitas rumah sakit mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK)). Langkah ini menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas pelayanan di rumah sakit yang melayani

pasien miskin atau tidak mampu. Dengan meningkatkan kapasitas rumah sakit, diharapkan dapat memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang berkualitas, terutama bagi mereka yang berada dalam kategori Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK). Upaya ini mencerminkan komitmen untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan di tingkat primer dan sekunder, sebagai bagian dari strategi dalam mengurangi angka stunting dan meningkatkan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Subang.

**Tabel 2 Total Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023**

<b>Sub Total Tematik 00 - Bukan Tematik</b>	<b>Rp. 20.559.380.000</b>
<b>Total Kebutuhan Dana Fisik</b>	<b>Rp. 20.559.380.000</b>

Sumber: Diolah oleh Penulis Total Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023.

Rincian kegiatan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) mengungkapkan total pagu alokasi sebesar Rp. 20.559.380.000. Dari anggaran tersebut, terdapat dua sub-bidang utama yang menjadi fokus, yaitu 02.01.01 yang menekankan penguatan layanan maternal neonatal di Puskesmas, dan 02.01.02 yang berfokus pada penguatan kapasitas Rumah Sakit (RS) Mampu Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Pertama yang Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK). Pada sub-bidang 02.01.01, kegiatan-kegiatan yang tercantum meliputi penguatan layanan maternal neonatal, seperti penyediaan layanan ultrasonografi (USG) dan alat surveilans gizi. Di sisi lain, sub-bidang 02.01.02 menekankan pada penguatan kapasitas RS Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) dengan penyediaan berbagai alat kesehatan yang diperlukan.

Dalam sub-bidang 02.01.01, upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan maternal dan neonatal di tingkat primer, terutama di Puskesmas. Penyediaan alat seperti USG bertujuan untuk mendukung pemantauan kehamilan dan perkembangan janin secara lebih akurat. Selain itu, penyediaan alat surveilans gizi juga penting untuk memonitor status gizi ibu hamil dan bayi yang baru lahir, sehingga dapat dilakukan intervensi yang tepat waktu.

Sementara itu, sub-bidang 02.01.02 menekankan pada peningkatan kapasitas RS Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK), yang berperan sebagai pelayanan kesehatan rujukan tingkat pertama bagi masyarakat yang membutuhkan. Penyediaan alat kesehatan yang memadai di rumah sakit tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama bagi pasien-pasien yang berada dalam kategori Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK).

Dengan demikian, rincian kegiatan DAK ini mencerminkan upaya konkret dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan di tingkat primer dan sekunder, demi mendukung upaya penanggulangan stunting dan peningkatan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Alokasi Dana yang Signifikan: Total alokasi dana yang cukup besar menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan layanan kesehatan terkait stunting. Pilihan Kegiatan yang Relevan: Kegiatan yang dipilih terfokus pada penguatan layanan maternal neonatal dan kapasitas rumah sakit Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK), yang sesuai dengan kebutuhan penurunan angka stunting.

Tepat Sasaran Merujuk pada kemampuan untuk mengalokasikan dan menggunakan dana tersebut secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan utama, yaitu mengurangi angka stunting di wilayah tersebut. Hal ini sejalan dengan program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Subang. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang menyatakan bahwa: Menyangkut upaya untuk mencapai target sasaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, menekankan perlunya



fokus pada Zero New Stunting dengan memastikan bahwa remaja putri dan calon ibu mendapatkan perawatan kesehatan yang optimal sebelum kehamilan.

Stunting bukan hanya masalah kesehatan saat ini, tetapi juga investasi pada masa depan generasi mendatang. Untuk mencapai visi Zero Stunting, Dinas Kesehatan Kabupaten Subang memprioritaskan perawatan kesehatan yang optimal bagi remaja putri dan calon ibu sebagai langkah kunci dalam mencegah stunting sejak dini. Remaja putri dan calon ibu merupakan kelompok yang rentan terhadap risiko stunting karena mereka adalah para penyedia utama nutrisi untuk pertumbuhan janin. Oleh karena itu, memastikan bahwa mereka mendapatkan perawatan kesehatan yang optimal sebelum kehamilan adalah strategi proaktif yang efektif untuk mencegah stunting pada generasi berikutnya.

Pendekatan holistik diperlukan dalam upaya ini. Pertama-tama, edukasi dan penyuluhan kesehatan harus diintensifkan, terutama dalam hal gizi seimbang dan gaya hidup sehat. Remaja putri perlu diberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya asupan nutrisi yang cukup, termasuk asupan zat besi, kalsium, dan asam folat, untuk mempersiapkan tubuh mereka secara optimal untuk masa kehamilan nantinya. Selain itu, program pemeriksaan kesehatan rutin harus ditingkatkan. Pemeriksaan kesehatan reguler memungkinkan identifikasi dini terhadap masalah kesehatan yang mungkin memengaruhi kemampuan mereka untuk hamil dan memberikan nutrisi yang cukup bagi janin. Ini termasuk pemeriksaan gizi, kesehatan reproduksi, dan konseling prakonsepsi. Selanjutnya, akses yang mudah dan terjangkau ke layanan kesehatan reproduksi dan gizi harus diprioritaskan. Dinas Kesehatan harus bekerja sama dengan fasilitas kesehatan setempat untuk memastikan bahwa remaja putri dan calon ibu memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang dibutuhkan, termasuk suplemen gizi dan konseling gizi yang sesuai.

Dengan menjalankan strategi ini secara efektif, Dinas Kesehatan Kabupaten Subang dapat memainkan peran kunci dalam mewujudkan visi Zero New Stunting, memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Output merupakan hasil dari pelaksanaan kebijakan, dengan indikator : Tepat tidaknya sasaran yang dituju, berapa besar sasaran yang tercakup, seberapa banyak kelompok sasaran yang tertangani, seberapa besar kelompok yang terlibat. Mengacu pada hasil konkret atau informasi yang dihasilkan dari proses evaluasi yang menunjukkan sejauh mana evaluasi tersebut berhasil dalam menilai dan mengukur efektivitas, efisiensi, relevansi, dampak, dan keberlanjutan dari penggunaan anggaran DAK terhadap anak stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Subang. Selanjutnya, Kepala Subbagian Program dan Informasi Dinas Kesehatan Kabupaten Subang menyatakan bahwa: Jumlah sasaran anggaran sangat tergantung pada prioritas dan kebijakan pemerintah daerah, dengan melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan masyarakat dan data prevalensi stunting.

Hal ini membuktikan pernyataan tersebut menggambarkan bahwa jumlah anggaran yang dialokasikan sangat dipengaruhi oleh prioritas dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini dilakukan dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan masyarakat dan data prevalensi stunting. Dalam konteks tersebut mengacu pada jumlah dana yang akan dialokasikan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, untuk program-program yang bertujuan untuk mengatasi masalah stunting. Kebijakan dan prioritas pemerintah daerah kemudian menjadi faktor penentu dalam menentukan seberapa besar anggaran yang akan dialokasikan untuk tujuan tersebut. Evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan masyarakat dan data prevalensi stunting menjadi landasan untuk pengambilan keputusan terkait alokasi anggaran. Dengan menganalisis data prevalensi stunting dan memahami kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, pemerintah daerah dapat menentukan dengan lebih tepat berapa banyak anggaran yang harus dialokasikan untuk program-program pencegahan stunting.

Secara keseluruhan, pernyataan tersebut menggambarkan pentingnya melakukan evaluasi yang komprehensif terhadap kebutuhan masyarakat dan data prevalensi stunting sebagai dasar untuk menentukan jumlah anggaran yang diperlukan untuk mengatasi masalah stunting di wilayah tersebut. Hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa hasil dari evaluasi sebelumnya dapat mempengaruhi perubahan dalam prioritas atau fokus program penanggulangan stunting. Contohnya, jika evaluasi menunjukkan bahwa faktor gizi masyarakat menjadi penyebab utama prevalensi stunting, maka perubahan dalam target program dapat mengarah kepada program-program yang lebih menekankan pada pencegahan gizi buruk dan pemberian makanan tambahan. Evaluasi yang menyeluruh dan akurat menjadi landasan untuk mengidentifikasi perubahan yang diperlukan dalam strategi dan program penanggulangan stunting. Jika evaluasi menemukan bahwa faktor gizi masyarakat memiliki dampak yang signifikan pada prevalensi stunting, maka penyesuaian dalam target program menjadi penting untuk memastikan efektivitas intervensi. Dengan demikian, perubahan prioritas atau fokus program merupakan respons yang tepat terhadap temuan dari evaluasi sebelumnya, yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mencapai hasil yang lebih baik dalam mengurangi stunting di wilayah tersebut.

Evaluasi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap anak stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Subang menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan layanan kesehatan maternal neonatal dan memperkuat kapasitas rumah sakit (RS). Meskipun alokasi dana yang signifikan telah dialokasikan, tantangan-tantangan yang dihadapi masih menjadi perhatian utama. Salah satunya adalah keterbatasan dana, di mana alokasi yang besar pun mungkin tidak mencukupi untuk mencakup semua kebutuhan terkait penurunan angka stunting.

Keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi hambatan yang signifikan. Penguatan kapasitas rumah sakit memerlukan infrastruktur yang memadai dan tenaga kerja yang terlatih, yang mungkin tidak selalu tersedia di semua daerah, terutama di daerah yang lebih terpencil. Upaya untuk mengatasi keterbatasan dana termasuk pengalokasian dana dengan lebih efisien. Hal ini melibatkan penyesuaian alokasi dana sesuai dengan kebutuhan terbesar dalam upaya penurunan angka stunting. Selain itu, investasi dalam pelatihan dan pengembangan SDM, termasuk tenaga medis dan paramedis, menjadi penting. Hal ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan tenaga kesehatan yang berkualitas dan terlatih untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Menyadari tantangan-tantangan tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan dana, memperkuat infrastruktur kesehatan, dan meningkatkan kapasitas SDM. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengatasi hambatan-hambatan yang ada dan memastikan bahwa setiap dana yang tersedia digunakan secara maksimal untuk mendukung upaya penurunan angka stunting dan peningkatan kesehatan ibu dan anak di wilayah tersebut.

Penulis melakukan pengukuran terhadap partisipasi dalam perencanaan program lorong literasi melalui keterlibatan pemuda dalam kegiatan perencanaan berkaitan dengan kehadiran dalam rapat perencanaan program dan diterima atau tidaknya masukan dari pemuda.

## **3.2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Evaluasi Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK)**

### **3.2.1 Faktor Pendukung**

Evaluasi terhadap program Dana Alokasi Khusus (DAK) anak stunting menunjukkan bahwa program ini memiliki beberapa faktor pendukung yang dapat membantu mencapai tujuan program, yaitu menurunkan angka stunting di Indonesia. Faktor-faktor ini perlu diperkuat dan dioptimalkan agar program DAK Anak Stunting dapat memberikan dampak yang maksimal. Keberadaan tenaga kesehatan yang cukup, termasuk bidan di seluruh desa, menjadi faktor pendukung internal yang kuat

dalam mengoptimalkan anggaran dan alokasi khusus. Hal ini memungkinkan desa untuk melaksanakan program kesehatan dengan lebih efektif dan efisien. Sumber Daya Pendukung dan Bahan Dasar: Di Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, sumber daya pendukung seperti alat pendukung stunting dalam perbaikan gizi anak sudah cukup. Anggaran yang diperoleh pada tahun 2023 telah digunakan untuk mendistribusikan alat antropometri ke sekitar 1500 posyandu di Kabupaten Subang. Faktor pendukung eksternal dalam evaluasi anggaran dana alokasi khusus untuk anak stunting adalah faktor-faktor dari luar entitas yang bertanggung jawab atas alokasi dan penggunaan dana tersebut. Faktor-faktor ini dapat mencakup berbagai elemen yang mendukung proses evaluasi dan pengawasan terhadap penggunaan dana secara efektif dan efisien. Dukungan Terhadap penyusunan anggaran juga tidak hanya terdapat dari pihak internal, tapi juga pihak eksternal. Dukungan eksternal ini memperkuat upaya dinas dalam mengevaluasi program dan memastikan keberhasilannya dalam menangani stunting.

Dengan faktor-faktor pendukung internal dan eksternal yang kuat, diharapkan evaluasi anggaran dan alokasi khusus terhadap anak stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Subang dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien, serta memberikan dampak yang signifikan dalam menurunkan angka stunting di wilayah tersebut.

### **3.2.2 Faktor Penghambat**

Faktor penghambat dalam evaluasi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk anak stunting merujuk pada berbagai halangan atau kendala yang dapat mengganggu atau menghambat proses evaluasi efektif terhadap penggunaan anggaran DAK yang ditujukan untuk mengatasi masalah stunting pada anak-anak. Selain faktor pendukung, tentunya terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh eksekutor, dalam hal ini pemerintah daerah, dalam kemampuan untuk menyusun keuangan daerah. Salah satu hambatan yang cukup sering terjadi adalah dari segi administrasi. Wawancara dengan Kepala Subbagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Subang menyatakan bahwa:

Faktor penghambat internal dalam evaluasi anggaran dan alokasi khusus terhadap anak stunting antara lain adalah kurangnya pemahaman tentang administrasi yang tertib. Ketidaktahuan mengenai tata kelola administrasi yang benar dapat menghambat proses pengajuan anggaran, terutama terkait dengan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

Ada beberapa faktor penghambat yang dapat mengganggu evaluasi anggaran dan alokasi khusus, terutama dalam konteks penanggulangan stunting. Pertama, keterbatasan sumber daya dan dana menjadi kendala yang signifikan dalam menjalankan program-program penanggulangan stunting, karena hal ini dapat membatasi kemampuan untuk mengimplementasikan program secara optimal. Kedua, perubahan kebijakan dari pemerintah pusat dapat mempengaruhi kelancaran program yang sedang berjalan, karena adanya perubahan kebijakan dapat memerlukan penyesuaian dalam perencanaan dan implementasi program. Ketiga, tantangan dalam mengkoordinasikan berbagai pihak terkait, seperti lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum, juga menjadi faktor penghambat yang penting, karena koordinasi yang kurang efektif dapat menghambat proses pelaksanaan program. Mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor penghambat ini akan menjadi langkah penting dalam memastikan efektivitas dari program penanggulangan stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Subang.

### **3.3 Upaya Mengatasi Faktor-Faktor Penghambat Dalam Evaluasi Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Anak Stunting**

Hambatan dalam evaluasi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap anak stunting harus segera diperbaiki, mengingat pentingnya kelancaran dan efisiensi dalam implementasi program

penanggulangan stunting. Upaya langsung merujuk pada tindakan atau langkah konkret yang diambil untuk mencapai suatu tujuan atau hasil tertentu. Dalam konteks hukum atau kebijakan, upaya langsung bisa merujuk pada tindakan yang secara spesifik ditujukan untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan yang diinginkan. Secara umum, upaya langsung adalah langkah konkret yang diambil untuk mencapai tujuan atau hasil tertentu tanpa melalui proses atau tahap yang berbelit-belit. Hambatan dalam evaluasi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap anak stunting harus segera diperbaiki, mengingat pentingnya kelancaran dan efisiensi dalam implementasi program penanggulangan stunting. Salah satu Upaya yang dilakukan adalah melakukan advokasi seperti yang diutarakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang: Advokasi kepada pimpinan daerah dan upaya mendapatkan dana alokasi khusus dari pemerintah pusat. Secara keseluruhan, hal ini bertujuan untuk meningkatkan faktor pendukung dari program evaluasi dana alokasi khusus untuk anak stunting dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal dan tepat sasaran sesuai dana alokasi khusus anak stunting.

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Berbeda dengan temuan penelitian yang sebelumnya telah dilaksanakan, pada penelitian ini peneliti menemukan sebuah temuan yakni terkait dengan faktor-faktor pendukung serta penghambat evaluasi anggaran dana alokasi khusus (DAK) terhadap anak *Stunting* di dinas kesehatan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat. Faktor pendukung ini terjadi karena adanya faktor internal serta eksternal, begitu pula dengan faktor penghambat yang ada juga terjadi karena disebabkan adanya faktor internal dan eksternal.

Faktor pendukung internal yakni adanya keberadaan tenaga kesehatan yang cukup, termasuk bidan di seluruh desa, menjadi faktor pendukung internal yang kuat, sedangkan untuk faktor pendukung eksternal ini adalah faktor-faktor dari luar entitas yang bertanggung jawab atas alokasi dan penggunaan dana tersebut. Faktor-faktor ini dapat mencakup berbagai elemen yang mendukung proses evaluasi dan pengawasan terhadap penggunaan dana secara efektif dan efisien.

Sedangkan untuk faktor penghambat internal yakni salah satu hambatan yang cukup sering terjadi adalah dari segi administrasi, untuk faktor penghambat eksternal yakni keterbatasan sumber daya dan dana menjadi kendala yang signifikan dalam menjalankan program-program penanggulangan stunting, karena hal ini dapat membatasi kemampuan untuk mengimplementasikan program secara optimal.

### **3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Penulis menemukan temuan dalam mengatasi hambatan dalam evaluasi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap anak stunting harus segera diperbaiki, mengingat pentingnya kelancaran dan efisiensi dalam implementasi program penanggulangan stunting, yakni dengan upaya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung baik yang berasal dari internal ataupun yang berasal dari eksternal. Upaya ini secara keseluruhan, hal ini bertujuan untuk meningkatkan faktor pendukung dari program evaluasi dana alokasi khusus untuk anak stunting dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal dan tepat sasaran sesuai dana alokasi khusus anak *stunting*.

## **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan kesimpulan yang dicapai penulis melalui penggunaan data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder, serta hasil wawancara yang dicapai, penulis diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam rangka Evaluasi Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Anak Stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat. Peneliti mendapatkan hasil dengan mengacu kepada teori evaluasi menurut Badjuri dan Yunowo dalam Hanif Nucholis (2007: 227). Terdapat 4 indikator diantaranya : Input, Proses, Output, Outcome
2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Evaluasi Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Anak Stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa dengan adanya faktor-faktor pendukung internal dan eksternal yang kuat, diharapkan evaluasi anggaran dan alokasi khusus terhadap anak stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Subang dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien, serta memberikan dampak yang signifikan dalam menurunkan angka stunting di wilayah tersebut. Serta adanya faktor penghambat dapat mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor penghambat ini akan menjadi langkah penting dalam memastikan efektivitas dari program penanggulangan stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Subang.
3. Upaya Mengatasi Faktor-Faktor Penghambat Dalam Evaluasi Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Anak Stunting secara keseluruhan, hal ini bertujuan untuk meningkatkan faktor pendukung dari program evaluasi dana alokasi khusus untuk anak stunting dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal dan tepat sasaran sesuai dana alokasi khusus anak stunting.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara serta dokumentasi saja.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan masih terus berlangsungnya anggaran DAK dalam menaggulangi *Stunting*.

## **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Subang yang telah membantu dan memberikan kesempatan untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## **VI. DAFTAR PUSTAKA**

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61 /PMK.07/2019 Tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PMK.02/2019 Tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga  
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023  
Peraturan Bupati Subang Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Subang

## JURNAL

- Irvanjaya Ramdan, I. (2022). *Implementasi Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Dalam Mendukung Pemulihan Kesehatan Pasca Covid-19 Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat*.
- Lathifah, F., & Ramdani, D. (2022). *Evaluasi Kinerja Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan*. *Media Riset Akuntansi*, 9(1), 15–38.
- Nurcholis, H. (2005). *Teori dan praktik pemerintahan dan otonomi daerah*.
- Oktavia, L. (2020). *Stunting pada Remaja Kawasan Buruh Industri dan Nelayan di Kota Surabaya*. *Biokultur*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.20473/bk.v9i1.21723>
- Rochaendi, E., & Salim, A. (2020). *Implementasi Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Sekolah Dasar*. *Transformasi: Jurnal Kepemimpinan & Pendidikan Islam*, 4(1), 29–40.
- Yuliana, R. (2019). *Evaluasi Dampak Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Terhadap Sosial Dan Lingkungan Masyarakat (studi Di Kelurahan Selatpanjang Selatan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti)*. Universitas Islam Riau.
- Yumanda, F. C., & Vidriza, U. (2022). *Pengelompokan Provinsi Prioritas di Indonesia Guna Menilai Efisiensi Proporsi Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Sanitasi dan Air Minum Tahun 2020*. *Journal of Social Development Studies*, 3(2), 142–159. <https://doi.org/10.22146/jsds.5012>

## Sumber Lainnya

- <https://bandung.kompas.com/read/2023/04/05/085016478/2022-prevalensi-balita-stunting-di-jabar-202-persen-sumedang-tertinggi-kota?page=all>
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/19/tertinggi-nasional-ini-prevalensi-balita-stunting-di-nusa-tenggara-timur>
- <https://benpas.subang.go.id/berita/kasus-stunting-di-subang-alami-penurunan-dp2kbp3a-dan-dinkes-subang-jelaskan-berbagai-upaya-pencegahan>